

**RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2026**

THE MANDALIKA
Arita Lombok



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

THE MANDALIKA

Arita Lombok

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diantaranya mengacu pada undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang isinya merupakan penjabaran rinci tentang Program Kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran serta sumbernya guna mencapai masing – masing target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

Dengan telah dikeluarkannya dokumen Renja ini, maka diminta kepada semua pihak terutama masing–masing unit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 sehingga kinerjanya dapat lebih terarah dan terukur.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan tetap membuka diri atas saran maupun masukan untuk penyempurnaannya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat memberi manfaat lebih bagi yang membutuhkannya.

Praya, Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah



Ir. LALU RAHADIAN, M.Si.
NIP. 196712311992031117

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	21
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	23
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUPR	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	43
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	46
BABV PENUTUP	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas PUPR	5
Tabel 2.2.	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang direncanakan	16
Tabel 2.3.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang direncanakan	16
Tabel 2.4.	Program/Kegiatan yang Melampaui Target yang direncanakan	20
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah - Tahun 2021	25
Tabel 2.6.	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	26
Tabel 2.7.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah	34
Tabel 3.1.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	39
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB	41
Tabel 3.3.	Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	43
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja (RENJA) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.



Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan prasarana harus diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas daerah dan nasional, serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam proses pembangunan dewasa ini, ketersediaan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan. Selain dengan melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah, upaya pemeliharaan prasarana secara terus menerus juga diperlukan. Upaya pemeliharaan ini berakibat diperlukannya sejumlah dana yang terus bertambah, karena tidak hanya prasarana yang memerlukan pemeliharaan makin membesar, tetapi juga biaya untuk material dan tenaga kerja juga meningkat. Upaya untuk melaksanakan pemeliharaan yang efisien perlu terus dilakukan sehingga keterbatasan biaya yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan berkurangnya kemampuan daerah tidak akan memperburuk kondisi prasarana. Salah satu cara efisien dalam pembangunan prasarana adalah melalui pemeliharaan yang baik. Umur pelayanan prasarana tidak hanya bergantung pada kualitas konstruksi prasarana yang telah dibangun, tetapi bergantung juga pada cara pemeliharaan. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Kerja (Renja) untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan prasarana dengan pendanaan yang terbatas dan memperhatikan skala prioritas karena prasarana dengan kondisi mantap akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, terukur dan aman untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan mampu berperan sebagai katalisator serta memberikan kontribusi yang nyata untuk terciptanya stabilitas sosial politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman rencana kerja yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap unit kerja lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yakni untuk Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dan menjadi prioritas penanganan dalam waktu satu tahun anggaran guna mencapai sasaran RKPD Kabupaten Lombok Tengah dan sebagai wujud implementasi nyata atau penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Disamping itu nantinya didalam menyusun program dan kegiatan maupuun hingga pada tahapan penyusunan sub-kegiatan dapat lebih terarah dan terukur yang pada akhirnya dapat mencapai sasaran pokok sesuai dengan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Secara sistematis penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, serta Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka perwujudan pencapaian target pada program kegiatan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU (TAHUN ANGGARAN 2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendasarkan pada pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan perkiraan pelaksanaan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berikut merupakan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas PUPR yang tertuang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun tahun 2024 (tahun berjalan/n-1) dengan 4 sasaran strategis dan 10 kegiatan utama, antara lain:

- a. Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dengan rincian kegiatan :
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani, dengan rincian kegiatan :
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.
- c. Tersedianya gedung pelayanan publik dan Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang, dengan rincian kegiatan :



- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung;
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Meningkatnya distribusi air minum, dengan rincian kegiatan
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Meningkatnya Kelayakan Jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 2.1 terkait capaian target kinerja dan penyerapan dana program / kegiatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

URAIAN/PROGRAM	INDIKATOR HASIL	TARGET 2024	REALISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	B Predikat
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase jalan mantap	86.58%	70.36%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Jaringan Irigasi	84.92%	85.58%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Regulasi Tata Ruang yang Diterbitkan	2 Regulasi	0 Regulasi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung Pemerintah Terbangun	3 Unit	1 Unit



URAIAN/PROGRAM	INDIKATOR HASIL	TARGET 2024	REALISASI
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan Bangunan Lingkungan yang Tertata	15000 m2	0 m2
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Aman	83.46%	78.82%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Akses Sanitasi Layak Dan Aman	100%	88.18%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih Dan Bersertifikat.	0.35%	0.54%

Sumber: Data Olahan

Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Program, pada masing-masing Indikator sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja nilai saki SKPD “BB”. Hal Ini dapat dirincikan sebagai berikut:

- Target Kinerja OPD: BB (Baik)
- Realisasi Kinerja OPD: B (Cukup Baik)
- Artinya, OPD tidak mencapai target yang telah direncanakan.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Jika kita anggap nilai SAKIP BB = 80-85 dan B = 70-79, misalnya:

- Target = 85
- Realisasi = 75

Maka:

$$\left(\frac{75}{85} \right) \times 100\% = 88.2\%$$

Artinya, OPD hanya mencapai 88.2% dari target yang ditetapkan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp23.991.650.574,00 dan realisasi sebesar Rp23.618.799.698,00 atau sebesar 98.44%, Dengan Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan masuk pada katagori



“Sangat Berhasil”

Factor-faktor pendukung tidak tercapainya sasaran, disebabkan antara lain:

1. Kelemahan dalam Pengawasan

✓ **Monitoring yang Tidak Konsisten**

- Evaluasi kinerja hanya dilakukan di akhir periode, bukan secara bertahap.
- Tidak ada sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengatasi masalah sebelum berdampak besar.

✓ **Kurangnya Akuntabilitas Internal**

- Pengawasan cenderung administratif, hanya melihat dokumen tanpa memastikan hasil di lapangan.
- Tidak ada mekanisme review dari pihak eksternal seperti akademisi atau masyarakat.

✓ **Minimnya Transparansi Data Kinerja**

- Laporan kinerja OPD mungkin tidak sepenuhnya terbuka, sehingga sulit bagi publik atau lembaga pengawas untuk memberikan masukan.

2. Kelemahan dalam Manajemen Kinerja

✓ **Target Tidak Didukung oleh Kapasitas yang Memadai**

- Sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur mungkin belum sepenuhnya siap untuk mencapai target **BB**.
- Masih ada keterbatasan anggaran atau peralatan yang mendukung program.

✓ **Kurangnya Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan**

- Keputusan berbasis data (data-driven decision making) masih rendah, sehingga kebijakan yang dibuat kurang efektif.

✓ **Lemahnya Koordinasi Antar OPD**

- Program tidak berjalan optimal karena kurangnya sinergi antar unit kerja di dalam OPD maupun dengan OPD lain.

✓ **Evaluasi Kinerja Lebih Berorientasi pada Output, Bukan Outcome**

- Fokus masih pada jumlah program/kegiatan yang dilakukan, bukan dampak nyata bagi masyarakat.



2. Program : Pengelolaan SDA

Dari Tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa Program Pengelolaan SDA Dengan target indikator kinerja Prosentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi 81,81%, dan teralisasi sebesar 85.18%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indicator program sangat bagus.

Program Pengelolaan SDA memiliki anggaran Rp18.587.134.496,00 dan realisasi sebesar Rp16.993.691.501,00 atau sebesar 91.42%, Dengan Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan masuk pada katagori “*Sangat Berhasil*”. Dan rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Indikator Program

- Target indikator kinerja: 81,81% luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi.
- Realisasi indikator kinerja: 85,18% luas daerah irigasi yang berhasil dilayani.
- Persentase pencapaian kinerja:

$$\left(\frac{85,18}{81,81} \right) \times 100\% = 104,12\%$$

Kesimpulan:

- Capaian melebihi target sebesar 4,12%, yang menunjukkan bahwa program berjalan dengan sangat baik.
- Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Bisa jadi ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya, misalnya metode irigasi yang lebih baik atau perbaikan infrastruktur yang memperluas cakupan layanan.

2. Analisis Kinerja Keuangan

- Anggaran Program Pengelolaan SDA: Rp18.587.134.496,00
- Realisasi anggaran: Rp16.993.691.501,00
- Persentase serapan anggaran:

$$\left(\frac{16.993.691.501}{18.587.134.496} \right) \times 100\% = 91,42\%$$

Kesimpulan:

- Serapan anggaran mencapai 91,42%, yang masuk dalam kategori “*Sangat Berhasil*” karena mendekati 100%.
- Program berjalan dengan baik tanpa mengalami pemborosan atau kekurangan dana yang signifikan.
- Efisiensi penggunaan anggaran kemungkinan besar terjadi, dengan realisasi yang hampir optimal tetapi masih menyisakan sekitar 8,58% anggaran.



Faktor pendukung pencapaian keberhasilan, antara lain

1. **Kelembagaan:** Koordinasi antar Pimpinan dan Unit untuk mensinkronisasikan antara IKU DPUPR, Renja DPUPR Tahun 2024 dan DPA DPUPR Tahun 2024 untuk melakukan pencapaian sasaran terutama Sasaran 3
2. Beroperasinya Inovasi Aplikasi Pengaduan Online Kinerja Saluran Irigasi
3. Perencanaan Program yang Matang dan Koordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR
 - Penyusunan target indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi DAK Fisik Irigasi, sehingga program berjalan sesuai skala prioritas.
 - Sinkronisasi antara kebutuhan daerah, perencanaan OPD, dan alokasi DAK Fisik Irigasi memastikan program lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
4. Efektivitas dalam Pelaksanaan Program
 - Pemanfaatan DAK Fisik Irigasi memungkinkan perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan lebih cepat dan sesuai standar.
 - Koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan daerah memastikan dana DAK digunakan tepat waktu dan sesuai perencanaan.
5. Manajemen Keuangan yang Optimal
 - Penggunaan anggaran sebesar 91,42% menunjukkan anggaran terserap hampir maksimal tanpa pemborosan.
 - Pemanfaatan DAK yang efisien, termasuk dalam pengadaan material dan pelaksanaan proyek, meningkatkan capaian kinerja keuangan.
6. Komisi Irigasi berperan dalam pengawasan berkala terhadap proyek irigasi yang dibiayai dari DAK Fisik, memastikan tidak ada penyimpangan.
7. Evaluasi kinerja irigasi dilakukan dengan melibatkan petani pemakai air, agar infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman ditargetkan sebesar 81,92%, namun realisasinya mencapai 78,82%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator program cukup baik, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki nilai anggaran sebesar Rp41.933.386.500,00, dengan realisasi sebesar Rp41.329.713.644,00



atau 99,15%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan program ini sangat baik, karena hampir seluruh anggaran telah terserap secara optimal. Dan rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Indikator Program

- Target indikator kinerja: 81,92% rumah tangga terlayani air minum aman.
- Realisasi indikator kinerja: 78,82% rumah tangga terlayani.
- Persentase pencapaian kinerja:

$$\left(\frac{78,82}{81,92} \right) \times 100\% = 96,21\%$$

Kesimpulan:

- Capaian kinerja program cukup baik dengan pencapaian 96,21% dari target.
- Meskipun belum mencapai target, selisih yang kecil menunjukkan bahwa program berjalan cukup efektif.
- Salah satu kemungkinan faktor penyebab ketidaktercapaian target adalah perubahan jumlah penduduk yang mempengaruhi data kebutuhan air minum aman.

2. Analisis Kinerja Keuangan

- Anggaran Program: Rp41.933.386.500,00
- Realisasi Anggaran: Rp41.329.713.644,00
- Persentase Serapan Anggaran:

$$\left(\frac{41.329.713.644}{41.933.386.500} \right) \times 100\% = 99,15\%$$

Kesimpulan:

- Realisasi anggaran sangat baik dengan serapan 99,15%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana.
- Anggaran hampir terserap seluruhnya, tetapi ada kemungkinan perencanaan belum sepenuhnya memperhitungkan perubahan jumlah penduduk berdasarkan Surat dari Dinas Ketahanan Pangan Nomor 5302/264/DKP/2023.

4. Program Penyelenggaraan Jalan

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase jalan dalam kondisi mantap ditargetkan sebesar 86,58%, namun realisasinya hanya mencapai 70,36%. Target kinerja ini tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan program.

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki anggaran sebesar Rp40.915.094.737,00, dengan realisasi sebesar Rp38.168.851.209,00 atau 94,35%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan masuk dalam kategori "Sangat Berhasil",



meskipun secara fisik target kondisi jalan mantap belum sepenuhnya tercapai. Dan rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja

🚩 Indikator Kinerja:

- Target jalan kondisi mantap: 86,58%
- Realisasi jalan kondisi mantap: 70,36%
- Persentase pencapaian kinerja:

$$\left(\frac{70,36}{86,58} \right) \times 100\% = 81,26\%$$

◆ Kesimpulan:

- Capaian kinerja belum memenuhi target, dengan pencapaian hanya 81,26% dari target yang ditetapkan.
- Selisih realisasi sebesar 16,22% menunjukkan adanya kendala dalam pemenuhan target kondisi jalan mantap.
- Meskipun belum mencapai target, sebagian besar rencana telah terealisasi, menunjukkan adanya progres yang cukup baik dalam penyelenggaraan jalan.

2. Analisis Keuangan

🚩 Anggaran Program:

- Total anggaran: Rp40.915.094.737,00
- Realisasi anggaran: Rp38.168.851.209,00
- Persentase serapan anggaran:

$$\left(\frac{38.168.851.209}{40.915.094.737} \right) \times 100\% = 94,35\%$$

◆ Kesimpulan:

- Realisasi anggaran sangat baik, dengan serapan 94,35% dari total alokasi.
- Meskipun secara fisik kondisi jalan mantap belum sepenuhnya tercapai, serapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan dengan baik dari sisi keuangan.
- Perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa penggunaan dana telah efektif dan efisien dalam meningkatkan kondisi jalan sesuai target.

5. Program pengelolaan dan pengembangan air limbah,

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator target kinerja persentase akses sanitasi layak dan aman ditetapkan sebesar 100%, namun realisasinya hanya mencapai 88,18%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah memiliki anggaran sebesar Rp12.881.895.850,00, dengan realisasi sebesar Rp12.880.133.600,00 atau 99,92%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan masuk dalam



kategori "Sangat Berhasil", meskipun target akses sanitasi layak dan aman belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja

📌 Indikator Kinerja:

- Target akses sanitasi layak dan aman: 100%
- Realisasi akses sanitasi layak dan aman: 88,18%
- Persentase pencapaian kinerja:

$$\left(\frac{88,18}{100} \right) \times 100\% = 88,18\%$$

◆ Kesimpulan:

- Capaian kinerja belum mencapai target, dengan pencapaian 88,18% dari target yang ditetapkan.
- Meskipun belum 100%, capaian ini tetap tergolong tinggi, menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan cukup baik dalam meningkatkan akses sanitasi.
- Selisih sebesar 11,82% menunjukkan adanya kendala dalam pemenuhan akses sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat.

2. Analisis Keuangan

📌 Anggaran Program:

- Total anggaran: Rp12.881.895.850,00
- Realisasi anggaran: Rp12.880.133.600,00
- Persentase serapan anggaran:

$$\left(\frac{12.880.133.600}{12.881.895.850} \right) \times 100\% = 99,92\%$$

◆ Kesimpulan:

- Realisasi anggaran sangat baik, dengan serapan 99,92%, menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran telah dimanfaatkan sesuai perencanaan.
- Meskipun serapan anggaran sangat tinggi, pencapaian akses sanitasi masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.
- Perlu evaluasi lebih lanjut apakah penggunaan anggaran telah efektif dalam memperluas cakupan sanitasi layak dan aman.

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator target kinerja jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan ditetapkan sebanyak 2 (dua) regulasi, namun realisasinya 0 (nol) regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja program tidak tercapai.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki anggaran sebesar Rp332.038.750,00, dengan realisasi sebesar Rp330.491.526,00 atau 96,93%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan masuk dalam kategori



"Sangat Berhasil", meskipun target penerbitan regulasi tata ruang tidak terealisasi. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja

🚩 Indikator Kinerja:

- Target regulasi tata ruang yang diterbitkan: 2 regulasi
- Realisasi regulasi tata ruang yang diterbitkan: 0 regulasi
- Persentase pencapaian kinerja:

$$\left(\frac{0}{2}\right) \times 100\% = 0\%$$

◆ Kesimpulan:

- Capaian kinerja tidak mencapai target (0% dari target yang ditetapkan).
- Tidak adanya regulasi yang diterbitkan menunjukkan bahwa ada hambatan dalam penyusunan dan penerbitan regulasi tata ruang.
- Kinerja program ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui kendala utama dalam proses penyusunan dan pengesahan regulasi.

2. Analisis Keuangan

🚩 Anggaran Program:

- Total anggaran: Rp332.038.750,00
- Realisasi anggaran: Rp330.491.526,00
- Persentase serapan anggaran:

$$\left(\frac{330.491.526}{332.038.750}\right) \times 100\% = 96,93\%$$

◆ Kesimpulan:

- Realisasi anggaran sangat baik, dengan serapan 96,93%, menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran telah dimanfaatkan sesuai perencanaan.
- Meskipun serapan anggaran tinggi, tidak adanya regulasi yang diterbitkan menunjukkan bahwa dana yang digunakan belum memberikan output yang diharapkan.
- Perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan program.

7. Program Penataan Bangunan Gedung

Dari Tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa Indikator memiliki target kinerja Gedung Pemerintah Terbangun sebanyak 3 unit dan terbangun sebanyak 1 unit, dapat disimpulkan bahwa target capaian indicator sangat bagus.

Program Penataan Bangunan Gedung memiliki anggaran senilai Rp7.412.723.660,00 dan terealisasi sebesar Rp7.412.771.450,00 atau sebesar 97,47. Dengan Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan masuk pada katagori



“Sangat Berhasil”

1. Analisis Kinerja

📌 Indikator Kinerja:

- Target pembangunan gedung pemerintah: 3 unit
- Realisasi pembangunan gedung pemerintah: 1 unit
- Persentase pencapaian kinerja:

$$\left(\frac{1}{3}\right) \times 100\% = 33,33\%$$

◆ Kesimpulan:

- Capaian kinerja hanya mencapai 33,33% dari target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa target belum tercapai secara optimal.
- Pembangunan hanya 1 dari 3 gedung yang direncanakan menunjukkan adanya kendala dalam perencanaan atau pelaksanaan proyek.
- Perlu dilakukan evaluasi terkait penyebab keterlambatan atau kendala yang menghambat pembangunan gedung pemerintah.

2. Analisis Keuangan

📌 Anggaran Program:

- Total anggaran: Rp7.412.723.660,00
- Realisasi anggaran: Rp7.412.771.450,00
- Persentase serapan anggaran:

$$\left(\frac{7.412.771.450}{7.412.723.660}\right) \times 100\% = 97,47\%$$

◆ Kesimpulan:

- Serapan anggaran sangat baik (97,47%), menunjukkan bahwa hampir seluruh dana yang dialokasikan telah digunakan sesuai dengan perencanaan keuangan.
- Namun, tingginya serapan anggaran tidak sejalan dengan capaian fisik pembangunan, karena hanya 1 dari 3 gedung yang terbangun.
- Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan biaya pembangunan yang lebih tinggi dari perkiraan awal, hambatan dalam proses pelaksanaan, atau realokasi anggaran ke aspek lain dalam proyek.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang tentunya dapat mempengaruhi pencapaian maupun upaya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

- a. Sumber daya manusia berupa tenaga Teknis yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah masih minim, secara rasio komposisi tenaga teknis



yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lombok Tengah yakni 30:70, dimana 30% merupakan tenaga dengan kualifikasi teknis dan 70% dengan kualifikasi umum. Komposisi diharapkan adalah 70% tenaga teknis dan 30% adalah tenaga umum, sehingga diharapkan pada tingkat operasional teknis pelaksanaan penyediaan infrastruktur dapat terlaksana secara maksimal dan dengan kualitas hasil pelaksanaan yang optimal.

- b. Sarana dan prasarana berupa peralatan penunjang pemeliharaan jalan belum memadai, seperti halnya alat-alat berat dan alat-alat pengujian bahan material konstruksi.
- c. Ketersediaan Basis Data kondisi infrastruktur masih minim. Diperlukan basis data infrastruktur yang baik dan valid pada seluruh sektor layanan seperti data layanan air minum, layanan pengolahan dan penyediaan SPAL (Sistem Pengolahan Air Limbah), kondisi dan sebaran jaringan irigasi, data jaringan dan kondisi ruas jalan kabupaten dan desa, sebaran dan pemanfaatan tata ruang dan lain-lain sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target penyediaan infrastruktur di kabupaten Lombok Tengah.
- d. Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang, yang diakibatkan oleh keterbatasan jumlah personil yang menangani.
- e. Pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang pasca beroperasinya Kawasan KEK Mandalika dan pembangunan Jalan Bypass BIL-Mandalika.
- f. Alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur publik dan penataan ruang masih rendah, baik alokasi pembiayaan yang bersumber dari DAU maupun alokasi yang dapat dibiayai melalui DAK pada setiap tahunnya, berbanding tebalik dengan jumlah usulan pembiayaan yang direncanakan.

Selain permasalahan dan hambatan, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yakni :

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:
 - Penyediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap masih menjadi prioritas pertama masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur publik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya harapan masyarakat untuk memiliki akses jalan yang berkondisi layak dan mantap, baik berupa jalan kabupaten maupun jalan desa.
 - Kondisi jalan mantap kabupaten masih belum tersebar secara merata di setiap kecamatan maupun desa, yang pada akhirnya memicu kecemburuan



masyarakat dan rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah.

- Tingginya biaya penyediaan infrastruktur jalan baik pada tahap pembangunan maupun pemeliharaan jalan, dan hal ini berbanding terbalik dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia setiap tahunnya.
 - Meningkatnya jumlah penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan sarana dan prasarana air minum serta pengelolaan air limbah juga meningkat setiap tahun.
 - Banyaknya ruas jalan desa yang ingin ditingkatkan menjadi status jalan kabupaten, baik atas dasar usulan masyarakat langsung maupun penyampaian melalui lembaga Legislatif daerah.
 - Peraturan daerah tentang penataan ruang daerah yang masih minim dan belum sampai pada tingkat detail tata ruang daerah.
 - Belum optimalnya penindakan dan sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan dan pemanfaatan ruang.
- b. Peluang yang ada antara lain:
- Bertambahnya dukungan Kementrian/Lembaga yang menangani penyediaan infrastruktur publik daerah, terutama dalam upaya menunjang pengembangan kawasan KEK Mandalika dan meningkatkan kualitas daerah penunjang disekitar KEK Mandalika.
 - Minat dan kesadaran masyarakat untuk mengetahui aturan pemanfaatan ruang semakin hari semakin meningkat.
- a. Masih terjalinya sinergi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat dalam rangka kerjasama dan penyediaan infrastruktur publik, baik berupa dukungan program/kegiatan maupun dukungan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum terutama dalam hal penyediaan dan pengelolaan infrastruktur publik yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah telah banyak dilakukan ditahun 2024 lalu.



Berikut dijabarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah untuk tahun pelaksanaan 2024 yang tersaji pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Realiasi Kinerja Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Tahun 2024



NO	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target dan Realisasi Output			
		Uraian	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)				
A SEKRETARIAT					
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah					
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	1 Laporan	50%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2662	1881	70,66%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5	11	220%
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	6	100,00%
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	9	75%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100%
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	12	12	100%
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya (unit)	29	14	48,28%
	3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
B BIDANG BINA MARGA					
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota					
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan dan Pengendalian	1 Dokumen	1	100%
	2. Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	29,89	17,13	57,31%
	3. Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	16,4 m	5,41	32,99%
	4. Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	85 km	85 Km	100%
C BIDANG SUMBER DAYA AIR					
3. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER AIR (SDA)					
1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSI) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
	1. Penyusunan Rencana Teknis dan dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	4	4	100%
	2. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)	1	679,77 m	0
	3. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12 orang	22 Lembaga	100%
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota					
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi	5 km	4,184 km	83,68%
D BIDANG PENATAAN RUANG					
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
1. Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
	1. Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1	0	0
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
	1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	0	0
3. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota					
	1. Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perseujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	1	0	0
E BIDANG CIPTA KARYA					
5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan					
	1. Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Gedung untuk Kepentingan Strategi daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2	0	0
6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR MINUM					
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
	1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Cakupan Akses Air Minum Layak dan Terlayannya Sambungan Rumah (SR)	2200 SR	2011	91,41%
	2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	2012 SR	2883	143,29%
	3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyediaan Air Minum (SPA)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	1	100%
7. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sistem Air Limbah di Daerah Kabupaten/Kota					
	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	794	328 unit	41,31%
JUMLAH TOTAL					



Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat dievaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai. Tidak tercapainya indikator kinerja disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

A. Pogram Penyelenggaraan Jalan

1. Permasalahan/Isu Umum

- a. Terkait Pencapaian Jalan Mantap, maka dibutuhkan (a) Peningkatan Ke Jalan Mantap, (b) Menjaga Kondisi Jalan yang telah berada pada Status Mantap. Dan kedua upaya ini, setidaknya diintervensi melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan 2 (dua) Kegiatan/Sub Kegiatan yaitu (a) Rekonstruksi Jalan, (b) Pemeliharaan Rutin Jalan, (c) Pemeliharaan Berkala Jalan
- b. Sebagai overview, kebutuhan alokasi anggaran melalui Program Penyelenggaraan Jalan untuk meningkatkan dan mempertahankan Jalan Mantap untuk perencanaan pada periode-periode selanjutnya adalah berkisar 746 Miliar Rupiah.
- c. Alokasi anggaran melalui Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2020-2023 memiliki rerata pada angka: 61 Miliar Rupiah, dengan alokasi anggaran terbesar pada Tahun 2022 sebesar 296 Miliar Rupiah dan terjadi penurunan pada Tahun 2024 sekitar 50 % (dari 63,878 M menjadi 37,431 Miliar Rupiah)

2. Permasalahan di tahun 2024

- a. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 14,2 % (113,437 km) dari realisasi tahun 2023 yang telah mencapai 73,25%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya dilakukan pada panjang jalan 7,93 km. Itu artinya 105,507 km yang tidak bisa diintervensi melalui Kegiatan Rekonstruksi Jalan yang menyebabkan tidak mencapai target kinerja sebesar 86,58%
- b. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2024 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 303 km (Tahun 2023 dan 2024) dari 588,59 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 285,59 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan



- c. Penurunan pencapaian persentase Jalan Mantap disebabkan pula dengan penyesuaian panjang

B. Program Penyelenggaraan Tata Ruang

1. Proses Penyusunan Regulasi yang Terhambat

- Penyusunan regulasi tata ruang memerlukan kajian teknis, konsultasi publik, serta koordinasi dengan berbagai pihak, yang bisa memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan.
- Kemungkinan adanya revisi atau perbaikan dokumen yang menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan regulasi.

2. Kendala dalam Koordinasi Antar-OPD dan Lembaga Terkait

- Penyusunan regulasi tata ruang melibatkan Dinas PUPR, Bappeda, DPRD, serta instansi lainnya, sehingga jika koordinasi kurang efektif, proses dapat terhambat.
- Perbedaan pandangan dan kepentingan antar-pihak terkait dapat menyebabkan proses pengesahan regulasi menjadi lebih lama.

3. Perubahan Kebijakan atau Regulasi yang Berlaku

- Perubahan kebijakan di tingkat nasional atau daerah dapat menyebabkan revisi dalam penyusunan regulasi tata ruang, sehingga regulasi yang telah dirancang tidak dapat segera diterbitkan.
- Proses harmonisasi dengan aturan yang lebih tinggi dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan regulasi.

4. Kurangnya Kajian Teknis yang Mendalam

- Regulasi tata ruang harus didasarkan pada data teknis yang akurat, seperti analisis lingkungan, kebutuhan tata kota, serta dampak pembangunan. Jika kajian teknis belum lengkap, maka regulasi tidak dapat segera disahkan.
- Keterbatasan sumber daya atau tenaga ahli dalam melakukan kajian teknis dapat menjadi kendala dalam penyelesaian regulasi.

C. Program Penataan Bangunan Gedung

1. Ketidaksihesuaian Antara Target Kinerja dan Alokasi Anggaran

- Indikator kinerja menargetkan pembangunan 3 gedung, tetapi tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut, sehingga target menjadi tidak realistis.



- Seharusnya indikator kinerja disesuaikan dengan anggaran yang tersedia untuk menghindari target yang tidak dapat dicapai.
2. Kesalahan dalam Perencanaan Program
- Perencanaan program tidak selaras dengan penganggaran, sehingga target kinerja tidak dapat direalisasikan karena tidak didukung oleh dana.
 - Ada perubahan kebijakan atau skala prioritas dalam penganggaran yang menyebabkan target awal tidak mendapatkan alokasi dana.

D. Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Faktor penyebab terjadinya kegagalan, antara lain

1. Penyesuaian Data Jumlah Penduduk yang Tidak Optimal

- Surat dari Dinas Ketahanan Pangan mengindikasikan adanya perubahan jumlah penduduk yang berpengaruh pada penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah 2023, termasuk di dalamnya adalah jumlah penduduk
- Data jumlah penduduk yang tidak diperbarui secara akurat kemungkinan menyebabkan perencanaan distribusi layanan air minum kurang tepat sasaran, sehingga target tidak tercapai.

E. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

1. Perbedaan Indikator di Renja dan Renstra

- Jika indikator di Renja berbeda dari Renstra, maka ada ketidaksesuaian dalam perencanaan dan evaluasi program.
- Hal ini bisa menyebabkan target terlihat tercapai dalam laporan tahunan (Renja), tetapi tidak mendukung target jangka panjang (Renstra).

2. Penyesuaian Jumlah Penduduk (Berdasarkan Surat Dinas Ketahanan Pangan)

- Jika jumlah penduduk mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan dalam Renstra, maka persentase akses sanitasi layak akan turun karena cakupan layanan tidak berkembang sebanding.
- Bisa jadi data awal yang digunakan dalam Renja kurang akurat, sehingga target 100% menjadi tidak realistis setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan data terbaru dari Dinas Ketahanan Pangan.



2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat selaku konsumen penikmat layanan. Untuk itu isu strategis pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan sehingga mencapai level kepuasan masyarakat. Untuk dapat mencapai level tersebut diperlukan berbagai perbaikan yang keterkaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah penciptaan sistem pelayanan yang efisien yang tidak memberikan peluang terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan wewenang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum;
- Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah;
- Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan;
- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan;
- Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya belum optimal;
- Fungsi pengendalian dan penataan ruang yang belum konsisten;
- Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang;
- Masih belum optimalnya pemanfaatan surat Ijin Mendirikan Bangunan dalam mengendalikan fungsi tata ruang;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada lahan kritis.
- Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan kritis (belum mantap);
- Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu marka pengaman jalan dan terminal;
- Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi;

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan Langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, dapat di lihat pada Tabel 2.4 lampiran 1.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia dan pengelola infrastruktur publik, Dinas PUPR dalam menetapkan program dan kegiatan tentunya juga mengacu kebutuhan masyarakat. Usulan dan keinginan masyarakat telah disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan yakni melalui Musrenbang, baik Murenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang Tingkat Kabupaten (Forum SKPD).

Dalam Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024, yang diikuti oleh seluruh kecamatan lingkup kabupaten Lombok Tengah atau sejumlah 12 kecamatan telah dirangkum seluruh usulan yang berkenaan dengan penyediaan infrastruktur dasar publik. Usulan-usulan masyarakat ini tentunya tidak dapat seluruhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, karna keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten Lombok Tengah. Namun Dinas PUPR akan tetap berusaha memenuhinya melalui kerjasama dan pengusulan dukungan pembiayaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Program/ Kegiatan/	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
		Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas	
					Nasional	Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			187.645.300.000			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.660.000.000			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.000.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.335.000.000			



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Program/ Kegiatan/	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
		Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas	
					Nasional	Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/bu	18.750.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik 4. Integrasi Pelayanan Publik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	550.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se me SKPD	20 Laporan	35.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik 4. Integrasi Pelayanan Publik
Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.500.000.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	185.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	225.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.545.000.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	45.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.200.000.000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	450.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	29 Unit	1.750.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik 4. Integrasi Pelayanan Publik



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Program/ Kegiatan/	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
		Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas	
					Nasional	Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	86,95	16.875.000.000			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan debit air per/hektar	1,7 ltr/dtk/ha	6.375.000.000			
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	6 Dokumen	875.000.000	Tersebar		
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit	5.500.000.000			
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah irigasi primer dan skunder pada DI yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten	6 km	10.500.000.000			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6 km	10.500.000.000			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	85,01%	43.876.800.000			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat terlayani dan mengkonsumsi air Air Bersih	1950kk	43.876.800.000			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	6 Dokumen	525.000.000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Program/ Kegiatan/	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
		Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas	
					Nasional	Daerah
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	10800 SR	24.850.900.000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Integrasi Pelayanan Publik
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1080 SR	13.750.000.000	Tersebar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah masyarakat terlayani Air Bersih	750 KK	4.750.900.000	Tersebar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Integrasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses sanitasi layak dan aman	100%	7.300.000.000			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	2	7.300.000.000			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dokumen	300.000.000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	200 Rumah Tangga	1.500.000.000	Montong Ajan ,Prai Meke ,Pengenjek ,Bilebante ,Taman Indah ,Sisik ,Serage ,Segale Anyar ,Semparu ,Panjisari ,Renteng ,Praya ,Prapen ,Tiwugalih ,Gerantung ,Sasake	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Program/ Kegiatan/	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
		Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas	
					Nasional	Daerah
				,Dakung ,Labulia ,Sukarara ,Bunkate ,Bagu ,Sintung ,Pringgarata ,Murbaya ,Mas-mas		
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 Rumah Tangga	5.500.000.000	Montong Ajan ,Prai Meke ,Pengenjek ,Bilebante ,Taman Indah ,Sisik ,Serage ,Segale Anyar ,Semparu ,Panjisari ,Renteng ,Praya ,Prapen ,Tiwugalih ,Gerantung ,Sasake ,Dakung ,Labulia ,Sukarara ,Bunkate ,Bagu ,Sintung ,Pringgarata ,Murbaya ,Mas-mas	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Integrasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			7.000.000.000			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			7.000.000.000			
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2.500.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Integrasi Pelayanan Publik



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Program/ Kegiatan/	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
		Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas	
					Nasional	Daerah
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	2 Unit	4.500.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Integrasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Gedung Pemerintah Terbangun	3	1.500.000.000			
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomtek gedung ruang dan layak fungsi bangunan gedung yang diterbitkan	175	1.500.000.000			
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1.500.000.000			4. Integrasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	prosentase jalan mantap	93,20%	82.553.500.000			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten mantap	755,83km	82.553.500.000			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	6 Dokumen	698.500.000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	300.000.000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	9.73 KM	67.920.000.000	Olor Agung - Enjak ,Beson - Kerembong ,Pendem - Kijang - Stute ,Mujur - Peras ,Kateng - Jangkih Jawe ,Selangit - Kumbak (Batas Lobar)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Jalan dan Irigasi Kondisi Baik 1. Jalan dan Irigasi Kondisi Baik



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Program/ Kegiatan/	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
		Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas	
					Nasional	Daerah
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20.5 KM	13.635.000.000	Pemepek - Persil, Teratak - Benang Stokel, Ganti - Semoyang, K alisade - Bunut Baok, Ganti - Janapria, Mujur - Langko, Jembe - Langko, Rembitan - Kedaron,,	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	
Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan di Jalan Kabupaten	30 KM	12.180.000.000	Jembatan Senyong/Tanak Rarang (Bonder - Kelebu), Jembatan Tarung Arung		
Pemeliharaan Rutin Jalan	Mempertahankan Kondisi jalan kabupaten agar tetap dalam kondisi mantap	526,75 KM	9.104.382.500	Tersebar		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat	0,35%	330.000.000			
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih dan bersertifikat		250.000.000			
Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	250.000.000			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			80.000.000			
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	2 Dokumen	80.000.000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya regulasi tata ruang	2	1.550.000.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perda dan perbup tata ruang	2 Dokumen	900.000.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500.000.000			
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Dokumen	400.000.000			



Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Program/ Kegiatan/	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
		Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas	
					Nasional	Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pemanfaatan ruang	1 Dokumen	350.000.000			
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	500 Dokumen	350.000.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang	1 kegiatan	300.000.000			
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	300.000.000			



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dengan Visi dan Misi Kementerian PUPR RI adalah : *"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"* dengan Misi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PUPR RI Tahun 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Dengan Sasaran Strategis Kementrian PUPR RI Tahun 2021-2026 yakni :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - (3) Kapasitas tampung per kapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020- 2024 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas



Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA (Sumber Daya Air), meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional. Keselarasan ini dapat terlihat dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

No.	Sasaran Renstra Kementrian PUPR RI Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA.	Layanan air irigasi belum merata akibat kondisi jaringan irigasi yang masih dibawah standar.	Kondisi konstruksi jaringan irigasi kabupaten dibawah standar masih tinggi.	Kebutuhan masyarakat petani akan ketersediaan air yang mencukupi untuk layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
			Masih rendahnya alokasi anggaran peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.	
			Kurangnya jumlah embung, bendung atau tampungan air sebagai alternatif penyediaan air irigasi.	
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Masih tingginya jumlah ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap.	Penanganan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang rendah disetiap tahun.	Tingginya kebutuhan akan jalan kabupaten dengan kondisi mantap yang terkoneksi dengan jaringan jalan nasional.
			Terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten.	
			Alokasi utama penanganan jalan masih mengandalkan anggaran DAK pemerintah pusat.	
			Semakin banyak ruas jalan desa dan jalan non status yang ditingkatkan	



No.	Sasaran Renstra Kementrian PUPR RI Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			menjadi status jalan kabupaten.	
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Peningkatan kualitas SDM bidang konstruksi masih belum dilakukan secara optimal.	Belum tersedianya basis data SDM bidang konstruksi lingkup kabupaten. Rendahkannya jumlah pelatihan dan pembinaan SDM bidang konstruksi oleh yang diinisiasi pemerintah daerah.	Kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang semakin meningkat pada proyek konstruksi skala lokal dan regional.

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi NTB.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2026 yaitu : **“Terwujudnya RUANG Hunian yang Ideal dilengkapi Jalan mantap, Air lestari dan Utilitas umum (RUANG HIJAU) melalui Gerakan Membangun Infrastruktur yang Cemerlang (GEMILANG) “** dengan 8 misi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keseimbangan aksesibilitas dan konektifitas infrastruktur antar kawasan secara terpadu dalam pengembangan wilayah;
4. Meningkatkan kehandalan layanan sumber daya air;
5. Meningkatkan kemantapan jalan guna mendukung sektor unggulan dan kawasan strategis;
6. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan sanitasi serta kualitas penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan;
7. Meningkatkan daya saing jasa konstruksi yang unggul dan kompetitif;
8. Meningkatkan profesionalisme dan independensi pengendalian mutu material konstruksi.

Tujuan ingin dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi NTB berdasarkan Misi yang ada didalam RPJMD 2018 – 2023 (masuk dalam Misi I, Misi IV, dan Misi V) dapat dipilah menjadi 4 yaitu :

1. Pulihnya infrastruktur yg rusak akibat bencana gempa bumi;
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar;
3. Meningkatnya kualitas dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin.



Dari 4 tujuan tersebut secara lebih rinci terbagi menjadi 10 Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR Provinsi NTB yaitu :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan gedung perkantoran/ publik pasca bencana gempa bumi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap;
4. Meningkatnya ketersediaan air irigasi, dan mengurangi resiko bencana;40
5. Meningkatnya profesionalisme dan independensi pengawasan mutu infrastruktur;
6. Meningkatnya industri konstruksi yang kompetitif;
7. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan infrastruktur ke PU-an;
8. Meningkatnya sarana prasarana umum pada kawasan strategis;
9. Melaksanakan percepatan penataan ruang pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
10. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan air limbah.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran Dinas PUPR Provinsi NTB terdapat beberapa point yang selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, yakni persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap, meningkatnya ketersediaan air irigasi serta mengurangi resiko daya rusak air dan meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan air limbah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB.

NO	Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Masih tingginya jumlah ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap, yang mendukung akses terhadap jalan provinsi.	<p>Penanganan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang rendah disetiap tahun.</p> <p>Terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten.</p> <p>Alokasi utama penanganan jalan masih mengandalkan</p>	Tingginya kebutuhan akan jalan kabupaten dengan kondisi mantap yang terkoneksi dengan jaringan jalan provinsi.



NO	Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			anggaran DAK pemerintah pusat.	
			Semakin banyak ruas jalan desa dan jalan non status yang ditingkatkan menjadi status jalan kabupaten.	
2	Meningkatnya ketersediaan air irigasi serta mengurangi resiko daya rusak air.	Layanan air irigasi belum merata akibat kondisi jaringan irigasi yang masih dibawah standar.	Kondisi konstruksi jaringan irigasi kabupaten dibawah standar masih tinggi. Masih rendahnya alokasi anggaran peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kurangnya jumlah embung, bendung atau tampungan air sebagai alternatif penyediaan air irigasi.	Kebutuhan masyarakat petani akan ketersediaan air yang mencukupi untuk layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan air limbah	Belum meratanya sebaran layanan air minum lingkup kabupaten.	Jarak dan sebaran pemukiman penduduk yang berjauhan antara permukiman satu dengan permukiman lain. Terbatasnya sumber mata air. Kondisi topografi permukiman. Tingginya biaya dan rendahnya alokasi anggaran penyediaan sarana pendistribusian air minum.	Kebutuhan akan ketersediaan air minum yang tinggi.
		Belum meratanya penyediaan pengelolaan air limbah.	Rendahnya kemampuan individu dalam penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah rumah tangga/domestik. Terbatasnya lahan dalam rangka penyediaan	Semakin tingginya kesadaran dan minat masyarakat akan pengelolaan air limbah rumah tangga/domestik.



NO	Sasaran Renstra Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			pengolahan limbah rumah tangga/domestik. Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik.	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

3.2.1 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan yang dimaksud adalah merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati Lombok Tengah serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan target pencapaian dalam kurun waktu 1 (Satu) hingga 5 (Lima) Tahun.

Tujuan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah merupakan permasalahan pokok bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang pekerjaan umum dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Lombok Tengah, dimana Visi-nya adalah “Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya” dengan misi sebagai berikut:

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai SDM yang cerdas, mandiri, dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih;
4. Pembangunan ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas (merupakan misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah);
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan Visi-Misi Bupati Lombok Tengah, telaahan terhadap Visi-Misi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Visi-Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta dengan mencermati kondisi terkini dan isu-isu strategis yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka dirumuskanlah Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2021-2026 yaitu **“Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur Publik yang merata dan berkelanjutan”** dengan indikator berupa Indeks konektivitas, Indeks kinerja sistem irigasi, Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik, Ketaatan terhadap RTRW, Cakupan Layanan Air Minum, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

3.2.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.



Sasaran strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART, yaitu khusus (specific), terukur (measurable), dapatdicapai (attainable), nyata (realistic), dan tepat waktu (time bound).

Adapun Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap;
2. Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani;
3. Tersedianya gedung pelayanan publik dan ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang;
4. Meningkatnya distribusi air minum;

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2024 beserta indikator sasarnya diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Sasaran : Meningkatkan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Indeks Konektivitas	85,18	93.248
			Presentase jalan dalam kondisi mantap	70,36	93.29
2	Meningkatkan Cakupan Layanan Sistem Jaringan Irigasi Kabupaten	Sasaran : Meningkatnya prosentase DI kewenangan kabupaten yang terlayani	Indeks kinerja sistem irigasi	70.58	68.6
			Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	85.08	86.95
3	Tersedianya Pusat layanan Publik dan meningkatnya ketaataan ruang	Sasaran : Tersedianya gedung pelayanan publik dan ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik Ketaatan terhadap RTRW	60	68
			Gedung Pemerintah Terbangun Tepat waktu	1	3
			Presentase pemenuhan regulasi Tata Ruang	0	78
4	Meningkatnya Akses Air Minum	Sasaran : Meningkatnya distribusi air minum	Cakupan Layanan Air Minum	78.82	85.01
			Menurunya presentase kawasan rawan air minum	21.18	14,99



3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah di atas, maka diwujudkan kedalam 8 Program dengan 15 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan prioritas Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam Rencana Kerja Tahun 2024, yaitu:

A SEKRETARIAT

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3 Aministrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B BIDANG BINA MARGA

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Rekontruksi Jalan
3. Pembangunan Jembatan
4. Pemeliharaan Rutin Jalan

C BIDANG SUMBER DAYA AIR

3 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER AIR (SDA)

1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSI) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1. Penyusunan Rencana Teknis dan dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai
2. Operasi Dan Pemeliharaan Air Alami Lainnya
3. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota



- 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

D BIDANG PENATAAN RUANG

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- 1 Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
- 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- 3 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota

E BIDANG CIPTA KARYA

5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 1. Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Gedung untuk Kepentingan Strategi daerah Kabupaten/Kota

6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR MINUM

- 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perluasan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
 3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Penyediaan Air Minum (SPAM)

7 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sistem Air Limbah di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra Dinas PUPR 2021-2026, serta memperhatikan isu-isu strategis dan arah kebijakan nasional, maka disusunlah Rencana Pendanaan Tahun 2025 untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan pada Lampiran 2.



BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah ini dijadikan sebagai bahan acuan guna penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan secara optimal, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya :

1. Dukungan dan kerjasama seluruh komponen pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi dan konsolidasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan DPRD menjadi sesuatu hal yang sangat penting, dimana menyangkut kebijakan alokasi anggaran dan penyerapan keinginan serta aspirasi masyarakat melalui wakil-wakil mereka. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik diharapkan program kegiatan yang direncanakan mendapatkan alokasi pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan.
3. Peran serta dan dukungan seluruh masyarakat maupun seluruh unsur serta kelompok-kelompok swadaya yang ada sangat diperlukan terutama pada tingkat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dilapangan, sehingga penyediaan infrastruktur tersebut dapat tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
4. Meningkatkan komunikasi dan jalinan kerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat terutama dengan Kementerian Teknis terkait, dalam rangka sinergitas program kegiatan maupun dukungan pembiayaan yang pada akhirnya mampu menunjang pencapaian program pembangunan prioritas pemerintah kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si.
NIP. 196712311992031117

